

**Wawasan**  
**Halaman 17 dan 21**  
**Edisi Kamis, 19 Maret 2015**

**DIDUGA PELAKU MANTAN KARYAWAN**

**PUDAKPAYUNG** -Petugas gabungan Polda Jateng dan Polrestabes mulai menemukan titik terang kasus raibnya kas daerah milik Pemkot sebesar Rp 22 miliar yang disimpan di BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) Cabang Semarang.

Seorang wanita AU, mantan karyawan BTPN yang dicurigai sebagai pelakunya telah dilaporkan ke Polda Jateng oleh pihak bank BTPN.

Kapolda Jateng, Irlen Pol Nur Ali saat ditemui Wartawan di Mapolda Jateng,

Rabu (18/3) mengungkapkan, adanya laporan dari dua belah pihak membuat pihak kepolisian harus mengambil langkah mengkombinasi penyelidikan.

Dijelaskan Kapolda, Pemkot Semarang sebagai pemilik uang melaporkan hilangnya uang di Polrestabes Semarang. Sedang, pihak BTPN melaporkan seorang oknum mantan karyawan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan terkait raibnya de-

*Bersambung  
ke hal 21 kol 3*

## Jejak Raibnya Kas Daerah Rp 22 Miliar Milik Pemkot

- Tahun 2007, Pemkot Semarang menyimpan dana kas daerah yang bersumber dari APBD ke Bank BTPN Jalan Pandanaran Rp 45 miliar.
- Penyimpanan, dilakukan melalui sistem transfer dari Bank BRI Agro ke BTPN. Uang kas daerah disimpan bentuk giro.
- Tahun 2011, dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Semarang dan BTPN terkait penyimpanan dana.
- Oktober 2014, sesuai saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkot Semarang diminta membuat MoU baru atas penyimpanan dana kas daerah. Penyimpanan dalam berbentuk giro dialihkan ke deposito.
- 6 Januari 2015, Pemkot Semarang menyelenggarakan MoU dengan sejumlah bank yang menjadi tempat penyimpanan dana kas daerah. Dari 7 bank yang diundang, BTPN tidak hadir.
- Pertengahan Januari 2015, Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), Yudi Mardiana, mendatangi BTPN di Jalan Pandanaran. Dalam pertemuan, Yudi menunjukkan sertifikat deposito namun pihak bank tidak mengakui keaslian sertifikat tersebut. Pihak bank menyatakan ada tiga rekening baru atas nama Pemkot Semarang.
- Deposito Pemkot Semarang yang disimpan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) hilang kurang lebih senilai Rp 22 miliar. Deposito hanya tersisa Rp 80 juta.
- Pemkot melaporkan peristiwanya ke Polisi

Sumber Pemkot Semarang/Jek/hid-Ks

Grafis: Siswanto





Lanjutan ...

## DIDUGA PELAKU MANTAN KARYAWAN

### Diduga.....

(Sambungan hlm 1)

posito Pemkot Semarang ke Polda Jateng.

"Nanti akan kami kombinasi mana yang benar. Sementara ini penyidik masih mengumpulkan bukti bukti. Kedua pihak kami periksa," katanya.

Terpisah, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Djihartono, mengungkapkan, tim penyidik masih mendalami laporan Pemkot Semarang. "Masih kami dalam, beri kami waktu untuk mengungkapnya," kata Djihartono singkat.

### ■ BPK Audit

Sementara kasus raibnya rekening Kas Daerah (Kasda) Pemerintah Kota Semarang sekitar Rp 22 miliar yang disimpan di BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) Semarang diketahui menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng dalam audit regulernya. BPK menyatakan temuan itu masih diaudit.

Kepala Sub Bagian Hukum BPK Jateng, Supriyono Hadi kepada Wawasan Rabu (18/3) mengatakan, pihaknya tidak bisa menjelaskan soal proses dan temuannya tersebut.

"BPK belum bisa memberikan keterangan karena masih proses audit. Sesuai ketentuan Undang-Undang kami belum bisa menyampaikan ke publik," kata Supriyono dihubungi, Rabu (18/3).

BPK menyatakan prosesnya masih tahap pemeriksaan pendalaman. Atas pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Semarang tahun 2014 yang belum selesai tersebut, pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi.

"Kami belum keluarkan rekomendasi karena masih proses audit. Itu masuk pemeriksaan kasda. Karena masuk dalam laporan pertanggungjawaban ke-

uangan kabupaten/ kota. Akan kami cermati setiap laporan keuangannya, termasuk deposito keuangan," kata dia.

Sementara atas dugaan raibnya uang deposito berjangka di Bank BTPN Semarang, pihak bank menolak memberikan keterangan. Seorang petugas Bank BTPN Cabang Semarang di Jalan Pandanaran menyatakan, menyerahkan masalah itu ke kantor pusat di Jakarta.

"Silahkan saja hubungi kantor pusat di Jakarta. Kami tidak bisa memberikan keterangan," kata seorang petugas yang diminta konfirmasi sejumlah wartawan, menolak menyebut namanya. ■ *lek/ rdi/ hid-Ks*